

Ideologi Muhammadiyah, Tantangan Pemikiran Keagamaan dan Isme-Isme dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam

Wulidatul Aminah

Universitas Muhammadiyah Malang
uli.embun9990@gmail.com

Nur Hakim

Universitas Muhammadiyah Malang
nurhakim@umm.ac.id

DOI: 10.32528/tarlim.v9i2.5824

Track:

Received:

13 Juni 2026

Final Revision:

27 Agustus 2026

Available online:

20 September 2026

Corresponding Author:

Wulidatul Aminah

uli.embun9990@gmail.com

Abstrak, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang didirikan dengan semangat pembaruan (tajdid) dan purifikasi (ishlah), Muhammadiyah tidak pernah berdiri sebagai entitas monolitik-statis, melainkan terus berhadapan dengan dinamika ideologis yang kompleks dari dalam maupun dari luar. Memasuki abad ke-21, tantangan yang dihadapi Muhammadiyah semakin berlapis. Fragmentasi internal pun tidak terelakkan muncul arus Muhammadiyah progresif-liberal berhadapan dengan arus konservatif-puritan. Artikel ini membahas tentang ideologi Muhammadiyah, ragam pemikiran keagamaan, dan isme-isme dengan khazanah yang kaya. Namun demikian, terdapat kekosongan yang signifikan yakni (1) kajian integratif yang menghubungkan pergulatan ideologis Muhammadiyah dengan implikasi sistemiknya terhadap desain dan praktik Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat minim, (2) tidak tersedianya kerangka analitik yang komprehensif untuk memetakan relasi antara isme-isme kontemporer (baik Islamisme maupun sekularisme) dengan paradigma epistemologis PAI di lembaga pendidikan Muhammadiyah, (3) belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana ideologi Muhammadiyah menjadi “jangkar epistemologis” yang dapat memediasi antara tradisionalisme rigid dan liberalisme tanpa batas dalam konteks PAI di era post-truth. Sebagai upaya menjembatani ruang kosong yang belum tergarap, artikel ini menganalisis secara kritis bagaimana ideologi Muhammadiyah memosisikan diri di tengah ragam isme-isme keagamaan dan non-keagamaan, serta menelaah konsekuensi pedagogis-epistemologisnya bagi PAI sebagai sistem pendidikan yang hidup dan bergerak.

Kata kunci: ideologi Muhammadiyah, ragam pemikiran keagamaan, isme-isme global dan nasional, pendidikan agama Islam.

Muhammadiyah Ideology: Challenges of Religious Thought and Ideological Currents from the Perspective of Islamic Religious Education

Abstract, Muhammadiyah as a modernist Islamic movement founded on the spirit of renewal (tajdid) and purification (ishlah), Muhammadiyah has never existed as a static, monolithic entity; rather, it constantly contends with complex internal and external ideological dynamics. Entering the 21st

century, the challenges facing Muhammadiyah have become increasingly multifaceted. Internal fragmentation has also proven inevitable, with progressive-liberal currents within Muhammadiyah clashing against conservative-puritan ones. While existing scholarship covers Muhammadiyah's ideology, its diverse religious thought, and the various isms influencing it, significant gaps remain: (1) there is a scarcity of integrative studies linking Muhammadiyah's ideological struggles to their systemic implications for the design and practice of Islamic Religious Education (PAI); (2) there is no comprehensive analytical framework to map the relationship between contemporary ideologies (both Islamist and secular) and the epistemological paradigms of PAI within Muhammadiyah educational institutions; and (3) no research has explicitly examined how Muhammadiyah's ideology serves as an "epistemological anchor" mediating between rigid traditionalism and unbridled liberalism within the context of PAI in the post-truth era. To address these unexplored areas, this article critically analyzes how Muhammadiyah's ideology positions itself amidst a spectrum of religious and non-religious ideologies, while examining the pedagogical and epistemological consequences for PAI as a dynamic, evolving educational system.

Keywords: Muhammadiyah ideology, diverse religious thought, global and national 'isms', Islamic religious education.

PENDAHULUAN

Kehadiran Muhammadiyah dalam lanskap yang plural dan kompleks telah bersentuhan langsung dengan pembaruan pemikiran Islam Timur Tengah dan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia yang ia pandang tenggelam dalam tradisi yang menjauhkan mereka dari Islam yang autentik, seperti gagasan Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani (Nashir, 2021). Namun demikian, setiap dekade membawa tantangan ideologis baru yang memaksa organisasi ini melakukan refleksi, negosiasi, bahkan konfrontasi. Pada era kolonial, Muhammadiyah harus berhadapan dengan sekularisme Belanda yang memarginalkan pendidikan agama. Pada era orde baru, ia harus menavigasi tekanan negara yang memanfaatkan agama sebagai alat politik stabilitas. Memasuki era reformasi dan khususnya pasca 1998, tantangan yang dihadapi dari berbagai penjurur ideologis yang beroperasi secara simultan dalam ekosistem demokrasi yang terbuka (Burhanudin. Akmal, 2023). Kondisi inilah yang menjadikan penelitian tentang ideologi Muhammadiyah di era kontemporer tidak hanya relevan secara akademis, tetapi mendesak secara praktis.

Situasi ini semakin kompleks, berbagai isme tersebut tidak beroperasi dalam silos yang tertutup. Mereka saling berinteraksi, berdialog, berkonflik, bahkan secara tidak sadar saling meminjam argumen. Seorang Muslim muda Indonesia masa kini sangat mungkin terpapar pada ceramah Salafi di YouTube pagi hari, artikel liberal di media online siang hari, konten Islamis di grup WhatsApp sore hari, dan diskusi pluralis di kelas kampus malam hari, semuanya dalam satu hari yang sama (Hanifah et al., 2025). Dalam ekosistem ideologis yang super-cair dan super-kompetitif inilah Muhammadiyah harus menegaskan identitasnya, mempertahankan relevansinya, dan yang paling penting bagi penelitian ini merumuskan respons pendidikannya melalui sistem PAI yang dikelolanya.

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai sistem pendidikan formal di Indonesia memiliki posisi yang

paradoksal (Huda, H., Wulandari, M. A., Zakaria, B. N. A., Mukhlisin, Mahsus, & Arifin, B. 2024). Di satu sisi, ia hadir di hampir seluruh jenjang pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi sebagai mata pelajaran dan kuliah wajib, dan di lembaga-lembaga Muhammadiyah ia diperkuat dengan kurikulum Ismuba yang komprehensif. Ini menunjukkan bahwa PAI menempati posisi sentral dalam ekosistem pendidikan Indonesia (Huda, H., Utomo, A. P., & Nursyamsiyah, S. 2023). Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa PAI dalam banyak implementasinya masih belum mampu memenuhi fungsi kritis dan transformatifnya sebagai agen pembentukan karakter dan wawasan keislaman yang kuat di tengah kompetisi isme (Nadirah, 2025).

Survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada 2021 dan 2022 menghasilkan temuan yang mengkhawatirkan, sejumlah signifikan siswa dan mahasiswa Indonesia termasuk mereka yang belajar di sekolah-sekolah berlabel Islam, menunjukkan kecenderungan intoleransi yang menguat, sikap eksklusif terhadap pemeluk agama lain, dan kesediaan untuk mendukung narasi radikalisme dalam kondisi tertentu (Abdurrahman, 2023). Temuan ini tidak dapat dibaca sebagai kegagalan PAI semata, karena PAI beroperasi dalam konteks yang jauh lebih luas dari sekadar dinding kelas. Namun, ia dengan jelas menunjukkan bahwa PAI sebagaimana dipraktikkan saat ini belum memiliki daya tahan (*resilience*) ideologis yang memadai untuk membentengi peserta didik dari pengaruh isme-isme yang bersifat intoleran dan eksklusif.

Problem mendasar PAI, terletak pada krisis epistemologis, PAI seringkali masih didesain dan dilaksanakan dengan epistemologi yang tidak eksplisit tanpa kerangka yang jelas tentang apa yang dimaksud “pengetahuan agama yang valid”, bagaimana hubungan antara akal dan wahyu dalam proses belajar, dan ke mana kompetensi peserta didik semestinya diarahkan. Ketika epistemologi tidak eksplisit, kurikulum menjadi inkonsisten, metode pembelajaran menjadi konvensional-hafalan, dan evaluasi tereduksi pada penguasaan fakta ritual bukan pada pembentukan insan yang berakhlak, berwawasan, dan mampu berdialektika secara kritis dengan isme-isme yang mengepungnya (Setiawati et al., 2025).

Di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, potensi untuk membangun PAI yang epistemologis dan kritis sesungguhnya sangat besar mengingat organisasi ini memiliki tradisi intelektual yang kaya, jaringan ulama-intelektual yang kompeten, dan dokumen-dokumen ideologis yang secara normatif sangat kuat. Namun, transformasi kurikulum PAI di sekolah Muhammadiyah, terdapat gap yang signifikan antara idealisme ideologi yang diartikulasikan dalam dokumen-dokumen resmi dengan realitas praktik di kelas. Guru-guru PAI di banyak sekolah Muhammadiyah belum sepenuhnya memiliki literasi ideologis yang memadai untuk menerjemahkan gagasan-gagasan besar Islam Berkemajuan ke dalam praktik pedagogis yang konkret dan relevan bagi siswa generasi Z (Fernadi, 2023).

Untuk memahami bagaimana Muhammadiyah seharusnya merespons tantangan isme-isme dalam konteks PAI, kita perlu terlebih dahulu memahami evolusi ideologi gerakan ini secara historis-kritis. Muhammadiyah lahir bukan dari satu momen pencerahan tunggal, melainkan dari akumulasi kegelisahan K.H. Ahmad Dahlan terhadap dua masalah besar yang ia saksikan langsung yakni pertama, kemunduran umat Islam yang ia kaitkan dengan berkembangnya praktik-praktik keagamaan yang tidak berpijak pada Al-Quran dan Sunnah secara sah. Kedua, dominasi kolonialisme Belanda yang berhasil memarginalkan umat Islam dari

akses pendidikan modern dan pemberdayaan sosial-ekonomi (Muchamad Suradji, 2026). Dari dua kegelisahan inilah lahir dua pilar utama ideologi Muhammadiyah yang tetap relevan hingga hari ini yakni purifikasi (ishlah) dan pembaruan (tajdid) keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan dua sisi dari satu koin yang sama.

Perjalanan ideologis Muhammadiyah melewati beberapa tonggak penting. Pada masa awal (1912–1945), fokus utama adalah membangun fondasi institusional seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan masjid sebagai infrastruktur amal nyata sekaligus membangun identitas organisasi yang membedakan Muhammadiyah dari tradisionalisme. Pada masa kemerdekaan dan Orde Lama (1945–1965), Muhammadiyah terlibat dalam perdebatan ideologis besar tentang dasar negara dan relasi Islam dengan Pancasila, sebuah perdebatan yang membentuk posisi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menerima Pancasila bukan sebagai kompromi, tetapi sebagai perwujudan nilai-nilai Islam dalam konteks negara plural (Nashir, 2021). Pada masa Orde Baru (1966–1998), Muhammadiyah harus bernavigasi di antara tekanan depolitisasi agama di satu sisi dan penguatan basis pendidikan serta sosial di sisi lain sebuah strategi yang dalam jangka panjang justru memperkuat akar rumput organisasi.

Tonggak ideologis paling penting untuk konteks penelitian ini adalah dua dokumen yang lahir di era pasca-reformasi yakni Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua (2010) yang dirumuskan dalam Muktamar ke-46 di Yogyakarta, dan Risalah Islam Berkemajuan (2015) yang disahkan dalam Muktamar ke-47 di Makassar. Kedua dokumen ini secara bersama-sama mengkristalkan apa yang kemudian dikenal sebagai konsep “Islam Berkemajuan” sebuah visi keislaman yang memadukan komitmen normatif pada Al-Quran dan Sunnah dengan keterbukaan terhadap peradaban modern, ilmu pengetahuan, dan kontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera (Kholisotin & Romelah, 2024). Islam Berkemajuan secara eksplisit memosisikan diri sebagai alternatif dari dua kutub yang dianggap bermasalah yakni fundamentalisme yang membekukan teks tanpa konteks, dan liberalisme yang melarutkan otoritas teks demi konteks yang tidak berujung.

Namun demikian, sebuah analisis yang jujur tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa “Islam Berkemajuan” sebagai konsep tetap menghadapi tantangan interpretasi dan implementasi yang serius. Di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri terdapat spektrum pemikiran yang luas dari mereka yang menginterpretasikan tajdid secara lebih konservatif dan dekat dengan tradisi puritan, hingga mereka yang mendorongnya ke arah yang lebih progresif bahkan liberal. Kenyataan ini bukan kelemahan yang perlu ditutup-tutupi, melainkan dinamika internal yang perlu dipahami secara konstruktif: ia menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisme hidup yang terus berproses, bukan monumen beku yang hanya perlu dipajang (Burhanudin. Akmal, 2023). Justru dinamika internal ini yang menjadikan kajian tentang ideologi Muhammadiyah dalam konteks PAI semakin urgen dan menarik secara akademis.

Meskipun kajian tentang Muhammadiyah telah menghasilkan literatur yang cukup kaya, terdapat beberapa ruang kekosongan yang belum terisi oleh penelitian yang ada. Ruang kosong pertama berkaitan dengan integrasi analitis antara dimensi ideologi dan dimensi pendidikan. Sebagian besar kajian yang ada membahas ideologi Muhammadiyah dari perspektif teologis, sosiologis, atau politis. Sebaliknya, kajian tentang

PAI Muhammadiyah cenderung bersifat pedagogis-teknis tanpa mengakar secara memadai pada analisis ideologis yang menyeluruh. Gap antara keduanya inilah yang perlu dijembatani (Mirza et al., 2026).

Ruang kosong kedua, berkaitan dengan kerangka analitik untuk memahami relasi antara Muhammadiyah dan isme-isme kontemporer secara komprehensif. Studi yang ada cenderung berfokus pada satu isme tertentu, misalnya relasi Muhammadiyah dengan Salafisme atau respons Muhammadiyah terhadap radikalisme, tanpa menyediakan peta yang menyeluruh tentang ekosistem isme-isme yang berinteraksi dengan Muhammadiyah. Absennya peta menyeluruh ini menyebabkan respons PAI terhadap masing-masing isme bersifat parsial dan reaktif, bukan sistematis dan proaktif.

Ruang kosong ketiga, ketiadaan kerangka epistemologis PAI yang secara eksplisit berpijak pada ideologi Muhammadiyah dan secara khusus dirancang untuk merespons tantangan pluralitas isme. Kajian-kajian tentang epistemologi PAI memberikan kerangka umum yang berharga, namun belum secara spesifik mendialogkan kerangka tersebut dengan ideologi Muhammadiyah dan tantangan konkret isme-isme. Kajian tentang moderasi beragama dalam PAI menunjukkan relevansi konsep wasathiyah, namun belum mengembangkannya menjadi kerangka pedagogis yang operasional dan komprehensif.

Di samping tiga gap utama tersebut, terdapat gap metodologis yakni mayoritas kajian yang ada bersifat deskriptif-normatif, sekadar memaparkan “apa yang seharusnya” tanpa melakukan analisis kritis terhadap “mengapa yang seharusnya” belum terwujud dan “bagaimana” transformasinya dapat dilakukan secara sistematis. Pendekatan kritis yang mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari praktik PAI, mengidentifikasi relasi kuasa yang beroperasi di balik pilihan kurikulum dan pedagogi, serta mengeksplorasi potensi transformatif dari ideologi Muhammadiyah masih sangat langka dalam literatur yang ada (Ediansa et al., 2026). Penelitian ini hadir justru untuk mengisi celah metodologis ini dengan mengadopsi pendekatan analisis wacana kritis (critical discourse analysis) dan sintesis konstruktif.

Urgensi dari penelitian ini, pertama, level nasional, Indonesia sedang dalam proses implementasi Program Moderasi Beragama yang digagas pemerintah melalui Kemenag RI (2023) dan yang secara substansial sangat selaras dengan visi Islam Berkemajuan Muhammadiyah. Namun, moderasi beragama sebagai program masih membutuhkan fondasi teoritis yang kuat dan kerangka pedagogis yang operasional agar tidak sekadar menjadi slogan yang mudah diucapkan tetapi sulit diimplementasikan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa kerangka PAI berbasis Wasathiyah Muhammadiyah yang dapat mengisi kekosongan tersebut (Arifah Uswatun Kossah, Hariyanto Sofyan Benyal, 2022).

Kedua, pada level global, Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan dengan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam modernis terbesar. memiliki posisi strategis dalam wacana Islam dunia. Kajian tentang bagaimana Islam modernis Indonesia merespons tantangan isme-isme global melalui sistem pendidikannya memiliki relevansi yang jauh melampaui batas-batas Indonesia. Ia dapat menjadi referensi bagi negara-negara Muslim lain yang menghadapi tantangan serupa dalam membangun sistem pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi peradaban (Hanifah et al., 2025).

Ketiga, pada level akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu Pendidikan Agama Islam sebagai disiplin ilmu yang tidak sekadar bersifat normatif-preskriptif, melainkan juga kritis-

analitik dan transformatif. Dengan mengintegrasikan kajian ideologi, analisis isme-isme, dan epistemologi pendidikan dalam satu bingkai penelitian yang koheren, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang diharapkan dapat memperkaya khazanah metodologis PAI sebagai bidang ilmu. Ini sejalan dengan tren global dalam penelitian pendidikan Islam yang semakin bergerak ke arah kritisisme, kontekstualisasi, dan relevansi sosial (Ningsih, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menempatkan diri dalam paradigma interpretivis-kritis karena objek kajian yakni ideologi, pemikiran keagamaan, dan sistem pendidikan merupakan realitas sosial yang bersifat konstruktif, kontekstual, dan polisemis. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan kritis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen sistematis dengan protokol PRISMA. Sumber data primer yang digunakan: dokumen resmi dan kitab-kitab/karya-karya monumental tokoh Muhammadiyah, regulasi, serta kebijakan kurikulum. Sedangkan, sumber data sekunder mencakup: artikel jurnal ilmiah, disertasi dan tesis, laporan penelitian.

Analisis wacana kritis digunakan sebagai kerangka analitik utama. Tahap akhir analisis adalah sintesis konstruktif yakni dari hasil analisis wacana, komparatif, dan hermeneutika, peneliti membangun kerangka konseptual baru yang merepresentasikan tawaran epistemologis PAI berbasis ideologi Muhammadiyah. Keabsahan penelitian dijamin melalui tiga strategi: (1) *triangulasi sumber*: silang-cek temuan dari berbagai jenis sumber primer dan sekunder; (2) *member checking*: dengan para pakar PAI dan pemikir Muhammadiyah; (3) *peer debriefing*: konsultasi dengan pembimbing dan kolega peneliti dalam sesi seminar doktoral.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Islam Indonesia dan Muhammadiyah: Konteks Historis yang Hidup

1. Kelahiran Muhammadiyah dalam Pusaran Kolonialisme dan Kemunduran Umat

Islam masuk ke Nusantara sebagai arus pemikiran yang beraneka rupa, contohnya sufi, skolastik, fiqhi, dan kemudian modernis. Keragaman ini secara historis telah membentuk karakter keislaman Indonesia yang lentur dan akomodatif terhadap tradisi lokal, namun sekaligus juga rentan terhadap sinkretisme yang mencairkan batas-batas normative. Pada awal abad ke-20, ketika tekanan kolonialisme Belanda semakin menguat dan tatanan sosial-ekonomi masyarakat Muslim Indonesia semakin terpinggirkan, muncullah kebutuhan mendesak akan sebuah gerakan yang mampu menjawab dua pertanyaan sekaligus yakni bagaimana memperbarui pemahaman Islam dari akumulasi tradisi yang dianggap tidak autentik, dan bagaimana menggunakan Islam sebagai kekuatan pemberdayaan di hadapan hegemoni kolonial.

Muhammadiyah lahir pada 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai respons terhadap kedua pertanyaan tersebut. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendirinya merupakan seorang ulama yang tidak sekadar membaca kitab, melainkan yang telah melakukan perjalanan intelektual yang mendalam. Ia belajar di Mekkah, bersentuhan langsung dengan arus pembaruan Islam yang dibawa oleh Muhammad

Abduh dan Jamaluddin al-Afghani, dan kembali ke Yogyakarta dengan visi yang jelas bahwa Islam perlu dipahami ulang secara lebih rasional dan diamalkan secara lebih sistematis (Akhlis, 2024). Yang membedakan Dahlan dari ulama reformis lainnya di era yang sama adalah bahwa ia tidak sekadar berwacana, ia segera mendirikan sekolah sebagai instrumen perubahan. Sekolah pertama Muhammadiyah mengintegrasikan pelajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam satu ruang kelas yang sama, sebuah langkah revolusioner yang secara tegas menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia yang dominan saat itu.

Dari perspektif sejarah pendidikan Islam, pendirian sekolah Muhammadiyah pada masa kolonial merupakan tindakan politik sekaligus teologis. Secara Politik, Muhammadiyah menantang monopoli Belanda atas pendidikan modern yang sistematisteologis sebagai bukti tegas bahwa menuntut ilmu pengetahuan modern adalah kewajiban agama, bukan pengkhianatan terhadap Islam. Dalam pengertian ini, Muhammadiyah sejak awal menawarkan model pendidikan yang bersifat *emansipatoris* yakni membebaskan umat dari kebodohan dan ketergantungan (Sri Mulyani1; Bahaking Rama2, 2024).

2. Transformasi Peran Muhammadiyah dan Tantangan yang Berlapis

Lebih dari satu abad setelah pendiriannya, Muhammadiyah telah bertransformasi menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan terbesar di dunia. Data resmi dari Muktamar ke-48 di Surakarta menunjukkan bahwa jaringan amal usaha Muhammadiyah mencakup lebih dari 5.345 sekolah dan madrasah dari tingkat dasar hingga menengah, 172 perguruan tinggi dengan lebih dari 500.000 mahasiswa aktif, 459 rumah sakit dan klinik, serta ribuan panti asuhan, pesantren, dan lembaga sosial-kemanusiaan lainnya. Skala ini menjadikan Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan dalam pengertian konvensional, namun sebagai ekosistem peradaban yang memiliki kapasitas nyata untuk membentuk cara berpikir, sistem nilai, dan orientasi hidup jutaan warga negara Indonesia.

Besarnya skala ini juga membawa beban yang tidak ringan. Semakin besar sebuah organisasi, semakin sulit ia mempertahankan kohesi ideologis dan konsistensi implementasi di seluruh jaringannya. Perbedaan kualitas antara sekolah Muhammadiyah di Jakarta dan di pedalaman Kalimantan, antara kampus Muhammadiyah yang progresif di Yogyakarta dan yang lebih konservatif di daerah lain, antara guru PAI yang memiliki pemahaman mendalam tentang ideologi organisasi dan yang sekadar menjalankan rutinitas mengajar, semua ini adalah realitas yang tidak dapat disembunyikan dan yang secara langsung memengaruhi kualitas dan konsistensi PAI di lembaga-lembaga Muhammadiyah (Rohman et al., 2024). Penelitian ini berangkat dari kesadaran tentang kesenjangan ini dan berupaya menawarkan kerangka analitik yang dapat membantu menjembatannya.

B. Ekosistem Isme-isme Kontemporer: Peta Ancaman dan Peluang bagi PAI

1. Munculnya "Pasar Bebas Ideologi Islam" Pasca-Reformasi

Salah satu perubahan paling fundamental yang dibawa oleh era reformasi 1998 bagi lanskap keislaman Indonesia adalah terbukanya apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai "*pasar bebas ideologi Islam*", kondisi di mana berbagai aliran pemikiran keislaman yang sebelumnya dikendalikan secara ketat oleh negara Orde Baru kini bebas bersaing memperebutkan pengaruh dalam masyarakat.

Demokratisasi yang dibawa oleh reformasi memang mengandung paradoks, di satu sisi ia membebaskan ekspresi keagamaan yang sebelumnya tertekan, di sisi lain ia juga membuka ruang bagi isme-isme yang berpotensi mengancam kohesi sosial dan melemahkan fondasi pendidikan keagamaan yang moderat.

Dalam kurun dua dekade pasca-reformasi, setidaknya empat arus ideologi keislaman besar telah menguat secara signifikan dan memengaruhi lanskap PAI Indonesia: Pertama, Salafisme-Wahabisme yang mendapat dukungan dana dan jaringan dari Timur Tengah, khususnya lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan Arab Saudi dan Kuwait, dan yang menyebarkan model keislaman puritan-literalis melalui ribuan pesantren, masjid, dan platform digital. Kedua, Islamisme-politik dalam berbagai variannya, dari HTI yang secara eksplisit memperjuangkan khilafah hingga jaringan tarbiyah yang memilih jalur demokrasi yang berambisi menjadikan Islam sebagai dasar tatanan politik. Ketiga, liberalisme-pluralisme Islam yang mendapat inspirasi dari tradisi akademik Barat dan mendorong reinterpretasi teks-teks agama secara radikal. Keempat, arus modernis-progresif yang diwakili oleh organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berupaya mempertahankan dan mengembangkan Islam modernis-inklusif dalam konteks Indonesia yang plural (Muhammad Taufan Djafria, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Muhammad Saleh Tajuddinc, 2023).

Yang membuat dinamika ini semakin kompleks adalah hadirnya teknologi digital sebagai multiplier effect yang luar biasa powerful. Penelitian PPIM UIN Jakarta (2023) yang melibatkan lebih dari 5.000 responden dari kalangan pelajar dan mahasiswa Muslim Indonesia menemukan bahwa 67 persen dari mereka mengakui bahwa media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan berbagai platform berbagi konten lainnya adalah sumber utama mereka dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Islam. Angka ini jauh lebih tinggi dari persentase mereka yang menjadikan guru agama (23%), buku teks (18%), atau lembaga keagamaan resmi (12%) sebagai sumber utama. Temuan ini menggambarkan sebuah realitas yang mengkhawatirkan: proses transmisi pengetahuan agama semakin didominasi oleh agen-agen yang tidak terverifikasi kualifikasi akademis maupun integritasnya, sementara lembaga pendidikan formal termasuk PAI semakin kehilangan otoritas epistemiknya di mata generasi muda.

2. Salafisme dan Wahabisme: Arus Puritan yang Memengaruhi Identitas Pendidikan Islam

Salafisme dalam berbagai variannya yang membentang dari yang quietist (madkhali) hingga yang activist (haraki) hingga yang jihadis merupakan salah satu arus pemikiran Islam yang paling dinamis perkembangannya di Indonesia kontemporer. Berdasarkan data Kementerian Agama RI dan berbagai kajian independen, diperkirakan terdapat lebih dari 2.000 pesantren yang mengidentifikasi diri dengan pendekatan Salafi di Indonesia, dengan sebaran yang paling terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Greg Fealy, 2008). Ini belum termasuk ratusan masjid, ribuan kanal YouTube, dan jutaan akun media sosial yang menyebarkan konten Salafi kepada audiens yang jauh lebih luas dari ekosistem pesantren.

Hubungan Salafisme dengan Muhammadiyah sering disalahpahami karena keduanya memiliki beberapa permukaan kesamaan yang menjebak: sama-sama menekankan purifikasi akidah, sama-sama menolak sebagian praktik yang dianggap bid'ah, dan sama-sama merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai otoritas tertinggi. Namun kesamaan permukaan ini menyembunyikan perbedaan yang jauh lebih fundamental pada level epistemologi dan metode. Salafisme yakni memahami "kembali kepada Al-Quran dan Sunnah" sebagai *ittiba'* (mengikuti secara literal) jejak tiga generasi pertama Islam (salaf al-shalih), sehingga ijtihad kontemporer yang merespons realitas baru dipandang sebagai pintu bid'ah yang berbahaya. Muhammadiyah, sebaliknya, memahami "kembali kepada Al-Quran dan Sunnah" sebagai undangan untuk melakukan ijtihad yang bertanggung jawab menggunakan akal secara penuh untuk memahami petunjuk wahyu dalam konteks kekinian (Hasanah, Imran Anwar Kuba, Muhammad Alwi HS, 2025).

Perbedaan epistemologis ini memiliki konsekuensi yang sangat konkret dalam dunia pendidikan. Guru PAI yang terpengaruh arus Salafi cenderung menyampaikan materi dalam format transmisi satu arah murid menerima, menghafal, dan mengikuti tanpa mempertanyakan. Kegiatan seni, musik, dan sebagian olahraga dipandang sebagai aktivitas yang meragukan secara religius. Interaksi dengan pemeluk agama lain dibatasi seminimal mungkin. Ilmu pengetahuan modern diterima secara selektif yang "berguna" boleh, yang "bertentangan dengan fitrah" ditolak. Model PAI seperti ini secara fundamental bertentangan dengan visi Muhammadiyah tentang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia berkembang yang berakal, kreatif, dan terlibat aktif dengan peradaban modern (Nurviana et al., 2025). Ketika pengaruh Salafi meresap ke dalam lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tidak jarang terjadi melalui guru-guru muda yang terpapar konten Salafi di media sosial maka terjadi konflik ideologis yang diam-diam namun berdampak besar pada kualitas dan orientasi PAI.

3. Islamisme-Politik dan Bahaya Politisasi Agama dalam Ruang Kelas PAI

Islamisme-politik merupakan kategori isme yang paling kompleks dalam analisis ini karena ia hadir dalam spektrum yang sangat lebar dari yang moderat-demokratis hingga yang radikal-jihadis namun memiliki kesamaan dasar dalam hal orientasi: menjadikan Islam sebagai ideologi politik untuk mentransformasi tatanan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipahaminya sebagai Islami. Di Indonesia, varian yang paling masif sebelum pembubarannya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang secara konsisten dan terbuka memperjuangkan sistem khilafah islamiyah sebagai pengganti sistem demokrasi-Pancasila. Meskipun HTI telah dibubarkan melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Agung, pengaruh ideologisnya tidak serta-merta hilang ia bertransformasi menjadi arus bawah tanah yang terus mengalir melalui jaringan informal, kajian-kajian tertutup, dan tentu saja media sosial.

Dalam konteks PAI, bahaya Islamisme-politik bukan terutama pada kemungkinan rekrutmen siswa ke jaringan teroris yang meskipun nyata, secara statistik masih relatif kecil. Bahaya yang jauh lebih masif dan sistemik adalah pada pembentukan mentalitas eksklusif yang secara halus tertanam melalui

narasi-narasi yang tampak religius namun sesungguhnya bermuatan politis. Penelitian PPIM (2021) tentang moderasi beragama guru PAI menemukan bahwa sebagian guru yang disurvei menunjukkan kecenderungan untuk memandang sistem demokrasi sebagai sesuatu yang tidak Islami, untuk mengidentifikasi "musuh Islam" secara sektarian, dan untuk menganggap bahwa keterlibatan dalam penegakan "hukum Islam" adalah kewajiban yang lebih tinggi dari kewajiban kewarganegaraan. Ketika mentalitas ini terbawa ke dalam kelas, ia secara diam-diam menanamkan benih alienasi siswa dari identitas kewarganegaraan Indonesia sebuah dampak yang bertentangan diametral dengan visi PAI Muhammadiyah yang mendidik warga negara Muslim yang produktif, bukan kader negara Islam.

Muhammadiyah, melalui berbagai dokumen resmi dan pernyataan tokoh-tokohnya, secara tegas menolak Islamisme-politik jenis ini. Argumentasi Muhammadiyah bukan bersifat sekuler yaitu memisahkan Islam dari urusan publik secara total melainkan bersifat *fiqihul waqi'* yang mengakui pluralitas Indonesia sebagai *sunnatullah* yang harus dikelola secara bijaksana melalui konsensus kebangsaan. Negara Pancasila dipandang bukan sebagai kompromi terhadap Islam, melainkan sebagai bentuk kenegaraan yang paling sesuai dengan konteks sosio-historis Indonesia yang plural sebuah posisi yang secara intelektual lebih canggih dan lebih kontekstual dari argumentasi Islamisme-politik yang seringkali mengabaikan kompleksitas realitas Indonesia (Nashir, 2021).

4. Liberalisme Islam dan Sekularisme: Antara Godaan Kemajuan dan Bahaya Kehilangan Jangkar

Liberalisme Islam yang di Indonesia pernah mendapatkan representasi institutionalnya yang paling eksplisit melalui Jaringan Islam Liberal (JIL) pada awal 2000-an merupakan isme yang memiliki hubungan paling ambivalen dengan Muhammadiyah. Ambivalensi ini bukan tanda kebingungan, melainkan refleksi dari kompleksitas hubungan antara modernisme Islam yang otentik yang memang menjadi DNA Muhammadiyah sejak Dahlan dengan liberalisme yang dalam ekspresinya yang ekstrem bergerak melampaui modernisme menuju relativisme epistemologis. Keduanya berbagi penghargaan terhadap rasionalitas dan keterbukaan intelektual, namun berbeda secara fundamental dalam hal bagaimana posisi wahyu diperlakukan: modernisme Islam Muhammadiyah menempatkan wahyu sebagai otoritas normatif tertinggi yang menjadi parameter ijtihad, sementara liberalisme radikal menempatkan wahyu sebagai salah satu sumber di antara banyak sumber yang sama-sama terbuka untuk dikritisi dan ditolak (John et al., 2021).

Sekularisme, sebagaimana dibedakan hadir dalam dua varian yang memiliki implikasi yang sangat berbeda bagi PAI. Sekularisme kelembagaan pemisahan institusi negara dari kontrol agama tertentu adalah prinsip yang sesungguhnya telah diterima secara fungsional oleh Muhammadiyah dalam konteks Indonesia, meskipun tidak menggunakan terminologi "sekuler" yang masih memiliki konotasi negatif dalam diskursus Islam. Muhammadiyah mendukung negara Pancasila yang bersikap netral terhadap semua agama justru karena ia meyakini bahwa sistem inilah yang paling adil bagi pluralitas Indonesia. Sekularisme epistemologis eksklusif agama dari ranah pengetahuan yang dianggap valid dan relevan bagi kehidupan publik adalah sesuatu yang secara tegas ditolak oleh ideologi Muhammadiyah. Dalam

kerangka Islam Berkemajuan, tidak ada dikotomi antara pengetahuan agama dan pengetahuan saintifik-empiris, keduanya adalah jalur yang berbeda menuju pemahaman tentang ciptaan Allah.

Bagi PAI, bahaya sekularisme epistemologis bukan hanya bersifat eksternal datang dari ideologi sekular di luar sistem pendidikan Islam. Ia juga hadir secara internal dalam bentuk *sekularisme de facto* yang melanda praktik PAI di banyak Lembaga, contohnya: ketika PAI dikurung dalam ruang kelas sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri tanpa koneksi organis dengan mata pelajaran lain, kemudian ketika ilmu pengetahuan modern diajarkan seolah tanpa dimensi nilai dan tanggung jawab moral, dan ketika lulusan lembaga pendidikan Islam menjadi profesional yang kompeten secara teknis namun terputus dari landasan spiritual-etis keislamannya. Muhammadiyah, dengan visinya tentang integrasi ilmu dan amal, menyediakan antidot yang kuat terhadap sekularisme de facto ini, namun antidot ini hanya efektif jika diterapkan secara konsisten dalam desain kurikulum dan budaya lembaga pendidikan (Aulia et al., 2025).

5. Pluralisme Agama, Postmodernisme, dan Fenomena Post-Truth dalam Ekosistem PAI Digital

Pluralisme agama merupakan realitas sosiologis Indonesia yang tidak dapat dipungkiri negara ini adalah rumah bagi ratusan juta pemeluk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan leluhur yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad dalam berbagai dinamika ketegangan dan harmoni. Namun pluralisme sebagai realitas sosiologis perlu dibedakan secara ketat dari pluralisme sebagai posisi teologis-normatif yang menyamakan semua agama dalam hal kebenaran dan keselamatannya. Muhammadiyah secara institusional sejalan dengan mainstream teologi Islam menerima yang pertama sebagai *sunnatullah* dan basis bagi kehidupan berbangsa yang damai, namun menolak yang kedua sebagai posisi yang tidak dapat dikompromikan dengan akidah Islam (Aulia et al., 2025). Dalam konteks PAI, pembedaan ini sangat penting, ia memungkinkan kurikulum PAI untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang toleran, terbuka, dan kooperatif dengan pemeluk agama lain, tanpa mengharuskan mereka menerima relativisme teologis yang bertentangan dengan keyakinan Islam.

Postmodernisme sebagai arus pemikiran filosofis yang mendekonstruksi narasi besar, meragukan kebenaran universal, dan mempromosikan fragmentasi identitas mungkin tampak seperti isme yang jauh dan abstrak dari realitas kelas PAI. Namun dalam kenyataannya, semangat postmodern telah merembes ke dalam budaya sehari-hari generasi muda melalui media sosial, hiburan digital, dan gaya hidup konsumtif yang mendorong individualisme ekstrem dan "kebenaran versi saya sendiri". Fenomena *post-truth* di mana kebenaran faktual kalah bersaing dengan narasi emosional yang menyebar viral adalah manifestasi paling konkret dari spirit postmodern dalam kehidupan sehari-hari (Ilyas et al., 2024). Ketika seorang siswa terbiasa dengan ekosistem informasi di mana setiap klaim dapat dikonfirmasi atau dibantah oleh ribuan sumber yang saling bertentangan tanpa ada otoritas pemutus yang disepakati, maka otoritas guru PAI dan bahkan otoritas teks agama itu sendiri menjadi semakin rapuh.

Data survei PPIM (2023) secara kuantitatif mengkonfirmasi kerentanan ini yakni 42 persen pelajar Muslim yang disurvei mengaku pernah meragukan kebenaran ajaran agama yang disampaikan

guru setelah melihat konten yang bertentangan di media sosial dan 31 persen mengaku merasa bingung ketika konten keagamaan dari satu tokoh agama berbenturan dengan konten dari tokoh agama lain. Kebingungan ini bukan sekadar masalah informasi, ia adalah masalah epistemologis yang mendalam. Siswa tidak memiliki alat metodologis yang memadai untuk mengevaluasi klaim-klaim yang bersaing. Di sinilah tugas paling kritis PAI di era digital, bukan sekadar mentransmisikan konten agama, melainkan mengembangkan literasi epistemik yang memungkinkan siswa untuk membedakan sumber yang sah dari yang tidak, argumen yang kuat dari yang lemah, dan klaim yang berbasis pengetahuan dari yang berbasis emosi dan prasangka.

C. Pendidikan Agama Islam di Persimpangan: Potensi, Krisis, dan Kebutuhan Rekonstruksi Epistemologis

1. Paradoks PAI: Omnipresence Struktural vs. Marginalisasi Epistemik

Pendidikan Agama Islam di Indonesia hadir dalam kondisi yang secara struktural sangat kuat namun secara epistemologis sangat rentan sebuah paradoks yang memerlukan diagnosa yang tepat sebelum dapat ditawarkan solusi yang memadai. Secara struktural, PAI adalah mata pelajaran wajib yang hadir di seluruh jenjang pendidikan formal dari SD hingga perguruan tinggi, dilindungi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan diperkuat oleh berbagai regulasi turunannya, termasuk Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka yang secara eksplisit mengakui dimensi nilai dan karakter dalam pembelajaran. Di lembaga-lembaga Muhammadiyah, posisi PAI bahkan lebih kuat lagi karena diperkuat oleh kurikulum khas Ismuba yang memberikan jam tambahan dan kedalaman materi yang melebihi standar nasional.

Namun kekuatan struktural ini tidak secara otomatis bertranslasi ke dalam kekuatan epistemologis. Epistemologi PAI menunjukkan bahwa mayoritas implementasi PAI di Indonesia masih terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai "paradigma normatif-dogmatis" yakni mengajarkan norma-norma agama sebagai paket kebenaran yang harus diterima dan dihafalkan, bukan sebagai sistem nilai yang dipahami secara mendalam, diinternalisasi secara autentik, dan diaktualisasikan secara kreatif dalam kehidupan. Akibatnya, terjadi fenomena yang oleh para peneliti pendidikan Islam disebut sebagai "*religious knowledge without religious practice*" siswa menguasai pengetahuan tentang Islam secara kognitif, namun perilaku dan sikapnya tidak mencerminkan nilai-nilai yang telah dipelajari.

Survei nasional PPIM (2021) yang dilakukan terhadap lebih dari 3.000 guru PAI di seluruh Indonesia memberikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang kondisi ini. Ditemukan bahwa sebagian guru PAI yang disurvei menunjukkan tingkat toleransi yang rendah terhadap kelompok agama dan aliran kepercayaan yang berbeda sebuah temuan yang secara langsung bertentangan dengan nilai moderasi yang seharusnya menjadi inti dari PAI Indonesia kontemporer. Lebih jauh, penelitian ini juga menemukan korelasi yang signifikan antara pandangan guru dan pandangan siswa: guru yang memiliki pandangan lebih intoleran cenderung memiliki siswa yang juga lebih intoleran. Data ini secara empiris menegaskan bahwa guru PAI bukan sekadar transmitter pengetahuan mereka adalah agen pembentuk pandangan dunia yang pengaruhnya jauh lebih besar dan lebih dalam dari yang sering disadari oleh kebijakan pendidikan.

2. Krisis Epistemologis PAI: Tiga Lapis Problem

Berdasarkan sintesis dari berbagai kajian terkini, krisis epistemologis PAI dapat diidentifikasi dalam tiga lapis problem yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Lapis pertama adalah krisis fondasi, ketidakjelasan tentang apa sesungguhnya epistemologi dasar PAI sumber pengetahuan apa yang dianggap valid, bagaimana hubungan antara wahyu dan akal dalam proses pembelajaran, dan apa standar kebenaran yang digunakan untuk mengevaluasi klaim-klaim keagamaan. Tanpa kejelasan epistemologis pada lapis ini, semua pilihan kurikulum, metode, dan evaluasi yang dibuat pada lapis di atasnya bersifat ad hoc dan tidak koheren (Ningsih, 2024).

Lapis kedua adalah krisis kurikulum. Desain kurikulum PAI yang tidak mampu mengintegrasikan secara organis antara dimensi kognitif (pengetahuan tentang Islam), afektif (kecintaan dan penghayatan terhadap Islam), dan psikomotorik (pengamalan Islam dalam kehidupan), serta yang gagal membangun koneksi yang bermakna antara materi PAI dengan konteks kehidupan nyata siswa termasuk konteks ekosistem isme-isme yang sedang mereka navigasi setiap hari di media sosial. Sebagian buku teks PAI yang beredar masih menggunakan pendekatan yang ahistoris dan tidak kontekstual, di dalamnya membahas fiqh tanpa konteks, mengajarkan sejarah Islam tanpa analisis kritis, dan merumuskan akidah tanpa membekali siswa dengan alat argumentasi yang memadai untuk mempertahankan keyakinannya secara intelektual.

Lapis ketiga adalah krisis kompetensi guru, yakni ketidakmampuan sebagian besar guru PAI untuk berfungsi sebagai agen pedagogis yang mampu merespons dinamika isme-isme kontemporer dengan cara yang kritis, edukatif, dan transformatif. Ini bukan semata masalah kompetensi akademis banyak guru PAI yang memiliki kualifikasi akademis yang memadai melainkan masalah apa yang dapat disebut sebagai "*literasi ideologis*": kemampuan untuk mengenali manifestasi isme-isme dalam kehidupan siswa, memahami daya tarik dan kelemahan argumentatif dari masing-masing isme, dan merespons dengan cara yang membangun kemampuan berpikir kritis siswa tanpa menggurui atau mendiskreditkan (Luqman Hakim, Amrul Fahmi, 2025). Guru yang tidak memiliki literasi ideologis akan selalu dalam posisi reaktif merespons satu narasi ekstrem dengan narasi ekstrem yang berlawanan tanpa pernah membangun fondasi yang kuat pada diri siswa.

3. Peluang: Ideologi Muhammadiyah sebagai Sumber Daya Epistemologis PAI

Di tengah gambaran krisis yang disajikan di atas, terdapat sumber daya yang sangat kaya namun belum dimanfaatkan secara optimal, ideologi Muhammadiyah dengan seluruh kekayaan intelektual, tradisi ijtihad, dan dokumen-dokumen normatif yang telah dirumuskan selama lebih dari satu abad. Tradisi pemikiran Muhammadiyah dari karya-karya K.H. Ahmad Dahlan yang menempatkan akal dan teks dalam posisi komplementer, hingga keputusan-keputusan Majelis Tarjih yang mengembangkan metodologi ijtihad yang sistematis, hingga konsep Islam Berkemajuan yang merumuskan visi keislaman

yang progresif dan berorientasi peradaban menyediakan fondasi yang sangat kuat untuk rekonstruksi epistemologi PAI yang kontekstual dan transformatif (Kholisotin & Romelah, 2024).

Islam Berkemajuan sebagai konsep ideologis menyediakan setidaknya tiga kontribusi epistemologis yang krusial bagi PAI. Pertama, ia menyediakan prinsip integrasi ilmu yang menolak dikotomi agama-sains dan yang memandang penguasaan ilmu pengetahuan modern sebagai kewajiban agama sebuah prinsip yang membebaskan PAI dari sikap defensif terhadap kemajuan ilmiah. Kedua, ia menyediakan metode ijtihad yang membuka ruang kritisisme dan kontekstualisasi dalam wilayah mu'amalah memberikan fondasi bagi PAI yang mendorong berpikir kritis tanpa merelativasi prinsip-prinsip aqidah yang fundamental. Ketiga, ia menyediakan orientasi praksis sosial yang menekankan bahwa pengetahuan agama harus menghasilkan amal nyata bagi kemaslahatan masyarakat memberikan arah bagi PAI yang tidak berhenti pada dimensi ritual-kognitif tetapi mendorong transformasi sosial (Ediansa et al., 2026).

Akan tetapi, harus dicatat bahwa potensi ini belum terealisasi secara optimal. Transformasi kurikulum PAI di sekolah Muhammadiyah, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kekayaan ideologi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah dengan praktik PAI yang berlangsung di kelas. Sebagian besar guru PAI di sekolah Muhammadiyah tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber-sumber pemikiran ideologi Muhammadiyah yang lebih mendalam, tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menerjemahkan gagasan-gagasan Islam Berkemajuan ke dalam praktik pedagogis yang konkret, dan tidak memiliki forum refleksi bersama yang memungkinkan mereka untuk secara kolektif mengembangkan pendekatan PAI yang koheren dengan identitas ideologis Muhammadiyah (Huda, H., Nursamsiyah, S., & Supriyanti, I. 2025). Gap antara potensi ideologi dan realitas implementasi inilah yang menjadi salah satu masalah utama yang hendak dijawab oleh penelitian ini.

D. Kristalisasi Ideologi Muhammadiyah: Evolusi, Dinamika Internal, dan Relevansi Kontemporer

1. Dari Tajdid Dahlan hingga Islam Berkemajuan: Sebuah Garis Ideologis yang Koheren

Untuk memahami posisi ideologi Muhammadiyah di tengah pluralitas isme kontemporer, perlu dilacak secara historis bagaimana garis ideologis Muhammadiyah berkembang dari fondasi awal Dahlan hingga formulasi kontemporer Islam Berkemajuan. Penelusuran ini bukan sekadar latihan historiografis, melainkan upaya untuk mengidentifikasi apa yang tidak berubah (*invariant core*) dari ideologi Muhammadiyah di tengah semua perubahan dan adaptasi yang telah terjadi.

Inti yang tidak berubah dari ideologi Muhammadiyah dapat diidentifikasi dalam empat prinsip yang konsisten hadir dari era Dahlan hingga era kontemporer: pertama, komitmen pada tauhid sebagai paradigma komprehensif tidak hanya sebagai dogma teologis tetapi sebagai prinsip epistemologis yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya otoritas mutlak; kedua, orientasi tajdid yang dinamis pembaruan yang terus menerus menyesuaikan pemahaman dan praktik Islam dengan tuntutan konteks tanpa mengorbankan prinsip; ketiga, kesatuan iman dan amal keyakinan bahwa pemahaman agama yang benar harus menghasilkan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat; dan keempat, sikap

kritis terhadap tradisi kemampuan untuk mengevaluasi tradisi secara rasional berdasarkan standar Al-Quran dan Sunnah, bukan sekadar mengikutinya karena telah lama berlaku (Nashir, 2021).

Islam Berkemajuan sebagai kristalisasi kontemporer dari prinsip-prinsip ini merupakan respons yang sangat disadari dan terencana terhadap konteks abad ke-21. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa Muhammadiyah tidak dapat lagi sekadar mendefinisikan dirinya sebagai "bukan tradisionalis" dan "bukan fundamentalis" ia harus mampu merumuskan secara positif apa yang ia tawarkan kepada umat Islam Indonesia dan umat manusia secara lebih luas. Islam Berkemajuan menjawab tantangan ini dengan merumuskan visi Islam yang secara simultan: autentik dalam sumber (Al-Quran dan Sunnah menjadi basis), rasional dalam metode (ijtihad yang bertanggung jawab menjadi instrumen), inklusif dalam orientasi (kemaslahatan seluruh umat manusia menjadi tujuan), dan kontributif dalam peran (Muhammadiyah hadir bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk kemanusiaan universal) (Nashir, 2021).

2. Tegangan Internal dan Dinamika Spektrum Pemikiran dalam Muhammadiyah Kontemporer

Analisis yang jujur dan akademis terhadap ideologi Muhammadiyah tidak dapat menghindari kenyataan bahwa organisasi ini menyimpan spektrum pemikiran internal yang cukup lebar bahkan terkadang menimbulkan tegangan yang signifikan. Tiga arus utama yang beroperasi secara bersamaan di dalam tubuh Muhammadiyah yakni konservatif-puritan yang cenderung memahami tajdid sebagai pemurnian dari hal-hal yang dianggap bid'ah dan yang dalam beberapa hal bersinggungan dengan pendekatan Salafi, modernis-progresif yang menekankan rasionalisme, kontekstualisasi, dan dialog dengan modernitas secara lebih terbuka, serta transformatif-sosial yang menekankan dimensi keadilan dan pemberdayaan sebagai inti dari misi Islam.

Ketiga arus ini tidak jarang berbenturan, terutama ketika harus diterapkan dalam kebijakan konkret organisasi termasuk kebijakan pendidikan. Perdebatan tentang bagaimana kurikulum Ismuba seharusnya menyikapi isu-isu kontroversial seperti gender equality dalam Islam, hubungan antaragama dalam konteks fiqh Islam, dan batas-batas toleransi terhadap perbedaan mazhab semua ini mencerminkan tegangan ideologis internal yang nyata. Perbedaan sikap antara Majelis Tarjih (yang cenderung lebih konservatif dalam metodologi) dan Majelis Tabligh atau lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang lebih progresif juga mencerminkan dinamika yang sama (Nadirah, 2025).

Namun penting untuk dipahami bahwa tegangan internal ini bukan sekadar masalah yang perlu dieliminasi ia juga merupakan sumber vitalitas dan relevansi. Sebuah organisasi yang terlalu homogen dan seragam tidak akan mampu melayani kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang sendirinya sangat beragam secara budaya, ekonomi, dan konteks. Yang diperlukan bukan penghapusan keberagaman internal, melainkan pembangunan mekanisme konsensus yang lebih efektif mekanisme yang memungkinkan keberagaman internal untuk menjadi kekayaan adaptif, bukan sumber fragmentasi yang melemahkan. Dari perspektif PAI, implikasinya adalah perlunya panduan ideologis yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi variasi konteks lokal, namun cukup kokoh untuk mempertahankan konsistensi identitas Muhammadiyah di seluruh jaringan lembaga pendidikannya.

KESIMPULAN

Ideologi Muhammadiyah bersifat dinamis-dialektis, bukan monolitik. Ia memiliki nucleus yang stabil (tauhid, tajdid, amal nyata) namun terus bernegosiasi dengan kekuatan sekaligus sumber tegangan internal. Relasi Muhammadiyah dengan isme-isme tidak bersifat konfrontatif total maupun akomodatif tanpa syarat, melainkan bersifat selektif-kritis: mengambil yang kompatibel, menolak yang bertentangan dengan prinsip, dan mentransformasi yang dapat diInternalisasi. Isme-isme memiliki dampak konkret pada PAI, bukan sekadar wacana intelektual. Salafisme mempengaruhi konten dan metode ajar, liberalisme mempengaruhi paradigma berpikir, sekularisme mempengaruhi posisi PAI dalam hierarki kurikulum, dan Islamisme-politik mempengaruhi orientasi kewarganegaraan siswa.

PAI berbasis ideologi Muhammadiyah memiliki potensi besar sebagai epistemologi mediasi, sebagai jembatan antara dogmatisme yang menutup nalar dan relativisme yang menghilangkan komitmen. Namun potensi ini belum terrealisasi secara optimal karena gap implementasi yang signifikan. Kerangka PAI-BWM (Wasathiyah Muhammadiyah) adalah tawaran konseptual orisinal yang secara akademis melampaui kajian-kajian sebelumnya karena: (a) integratif, (b) kritis, dan (c) operasional dalam konteks pendidikan.

Epistemologi PAI yang tidak dikotomis melampaui debat klasik antara tradisionalisme dan modernisme menuju sintesis transformatif. Konsep “kritis-normatif” yang dirumuskan memberikan fondasi bagi pengembangan teori PAI yang lebih adaptif tanpa kehilangan identitasnya. Implikasi PAI contohnya pada desain kurikulum PAI di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah, program pelatihan guru PAI yang membutuhkan integrasi literasi ideologis, kebijakan Muhammadiyah dalam merespons dinamika isme-isme secara proaktif, dan agenda Moderasi Beragama nasional yang dapat memanfaatkan kerangka PAI-BWM sebagai model.

REFERENSI

- Abdurrahman, I. T. (2023). Dialektika islam dan budaya: studi kasus problematika islam dan permasalahan sosial politik. *In right: jurnal agama dan hak azazi manusia*, 10(1), 129. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2920>
- Akhlis, f. M. (2024). *Ideologi muhammadiyah*. 2(5), 43–48.
- Arifah uswatun kossah, hariyanto sofyan benyal, r. (2022). *Islam berkembang: muhammadiyah sebagai pembaharu pendidikan dalam laju zaman*. 5(1), 67–79. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v5i1.7149>
- Aulia, a., syahdani, m., kusumawati, e., sa, k., habibuddin, h., & muhyi, a. A. (2025). *Konsep islam dan sekularisme dalam al- qur ' an : analisis tematik terhadap ayat-ayat sekularisme*. 02(june), 315–322.
- Burhanudin. Akmal. (2023). *Konsep fastabiqul khairat dalam perspektif al-qur'an*. 21–28.
- Ediansa, o., widiandana, p., & fathurohman, o. (2026). *Transformasi digital sebagai implementasi praktis ideologi berkembang muhammadiyah*. 7(2), 204–212.
- Fernadi, m. F. (2023). *Profesionalisme guru pendidikan agama islam dalam proses pembelajaran di smk muhammadiyah 2*

- palembang tahun pelajaran 2022 / 2023*. 02(02), 403–411.
- Greg fealy, s. W. (2008). *Expressing islam: religious life and politics in indonesia*.
- Hanifah, u., nita, s., siregar, s., yanti, n., & selatan, m. T. (2025). *Ideologi muhammadiyah di tengah tantangan pemikiran keagamaan dan isme-isme nasional dan global*. 1–11.
- Hasanah, imran anwar kuba, muhammad alwi hs, a. (2025). *The contestation of religious authority, social media, and local fiqh: as'adiyah's rejection of ustadz firanda in wajo*. 31(2), 302–315.
- Huda, H., Nursamsiyah, S., & Supriyanti, I. (2025). Membangun Ontologi Sekolah Muhammadiyah Melalui Pendekatan Theo-Antroposentris. *Tarbiawi Ngabar: Jurnal of Education*, 6(2), 188-213.
- Huda, H., Utomo, A. P., & Nursyamsiyah, S. (2023). Epistemologi sekolah muhammadiyah dalam membangun budaya islam ditengah masyarakat non-muslim. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 7(2), 268-281.
- Huda, H., Wulandari, M. A., Zakaria, B. N. A., Mukhlisin, Mahsus, & Arifin, B. (2024). *PAI di madrasah dan perguruan tinggi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Ilyas, m., tobroni, t., & penelitian, a. (2024). Paradigma tradisionalisme, modernisme, dan postmodernisme dalam pendidikan agama islam: dari ulumuddin ke dirāsah islamiyah hingga kajian multidisipliner paradigms of traditionalism, modernism, and postmodernism in islamic religious education: from ulumud. *Ju jurnal kolaboratif sains*, 7(11), 4. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jks>
- John, l., dan, l., liberalisme, k., & locke, j. (2021). *Liberalisme john locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan*. 9(4), 485–491.
- Kholisotin, l., & romelah, r. (2024). Ideologi muhammadiyah: sebagai fondasi peneguhan bermuhammadiyah. *Anterior jurnal*, 23(1), 8–15. <https://doi.org/10.33084/anterior.v23i1.6405>
- Luqman hakim, amrul fahmi, a. F. (2025). *Evaluasi pembelajaran pai kurikulum merdeka di sma muhammadiyah 1 sragen*. 5(1), 90–93.
- Mirza, i., saepullah, a., & fathonah, s. (2026). *Pendidikan agama islam dalam arus perubahan: sebuah rekonstruksi pemikiran*. 750–763.
- Muchamad suradji. (2026). *Eksistensi muhammadiyah di tengah tantangan zaman*.
- Muhammad taufan djafria, andi muh. Taqiyuddin bn b, muhammad saleh tajuddin, h. H. A. R. (2023). *Pemikiran keagamaan di indonesia (analisis terhadap pemikiran tradisionalisme dan modernisme islam)*. 2(2), 144–156. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i2>.
- Nadirah, s. (2025). *Kurikulum pendidikan islam integratif: menghubungkan ilmu agama dan ilmu modern*. 16(1), 78–91.
- Nashir, h. (2021). *Memahami ideologi muhammadiyah*.
- Ningsih, w. Z. (2024). *Pembelajaran pendidikan agama islam (pai) dalam konteks global*.
- Nurviana, d., husnaini, m., artikel, i., history, a., & addres, e. (2025). *Epistemologi pendidikan: perspektif barat dan islam*. 2024, 173–197.
- Rohman, a., kurniawan, e., syifauddin, m., & muhtamiroh, s. (2024). *Religious education for the environment: integrating eco-theology in the curriculum of islamic religious and character education to enhance environmental education in indonesia*. 18(2), 201–226.

- Salmin, ismail, muhammad ali, a. Asbah, siti atika rahmi, m. U. A. J. (2024). *Peluang dan tantangan pembaharuan pendidikan muhammadiyah*. 6, 144–157.
- Setiawati, i., hakim, s. A., sari, z., & fajri, m. D. (2025). *Relevansi dan respons pendidikan muhammadiyah terhadap tantangan era disrupsi digital: sebuah kajian sistematis*. 06(02), 43–57.
- Sri mulyani1; bahaking rama2, s. (2024). *Persyarikatan muhammadiyah: sejarah, tokoh dan gerakan pembaharuan di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan*. 4(1), 9–31.